



Membangun Jatinangor dari Dialog

Refleksi Pembangunan Kawasan Pendidikan
Berbasis Kolaborasi

Dudi Supardi

MEMBANGUN JATINANGOR DARI DIALOG

Pengalaman Forum Jatinangor dalam Memfasilitasi
Komunikasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi

Dr. H. Dudi Supardi, ST., MM

Penerbit : Yayasan Muria Ilham Nusantara

Membangun Jatinangor dari Dialog : Pembangunan Kawasan Pendidikan Berbasis Dialog Multistakeholder

Penulis : Dudi Supardi

Afiliasi : Yayasan Muria Ilham Nusantara

Penerbit : Penerbit Yayasan Muria Ilham Nusantara

Tahun terbit : 2026

ISBN :

Hak cipta © 2026 Penerbit Yayasan Muria Ilham Nusantara

Dokumen ini dilindungi hak cipta. Penggunaan untuk keperluan pendidikan, riset, dan non-komersial diperkenankan dengan menyebutkan sumber. Adaptasi sistem untuk keperluan operasional memerlukan persetujuan penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari perjalanan panjang dialog, kegelisahan, dan pembelajaran bersama dalam mengelola dinamika pembangunan Kawasan Jatinangor. Sebagai kawasan pendidikan tinggi yang berkembang pesat, Jatinangor menyimpan potensi besar, namun sekaligus menghadirkan persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang tidak sederhana. Perubahan ruang, arus pendatang, serta bertemunya berbagai kepentingan sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat dan institusi untuk membangun komunikasi yang setara.

Forum Jatinangor sendiri tidak lahir secara tiba-tiba, termasuk dalam penamaan yang disepakati. Kesepakatan mengenai nama Forum Jatinangor terjadi secara bertahap melalui interaksi dan diskusi dalam Kelompok Kerja (Pokja). Beberapa usulan nama sempat muncul, antara lain *Pokja Proyek Pengembangan Pembangunan Jatinangor*, *Forum Peduli Jatinangor*, dan *Forum Jatinangor*. Nama **Forum Jatinangor** akhirnya dipilih karena dianggap paling merepresentasikan semangat keterbukaan dan kolaborasi lintas aktor, sejalan dengan tren forum multi stakeholder yang berkembang di Indonesia pada saat itu, seperti *Forum Warga* dan *Forum Perkotaan*. Pilihan nama ini menegaskan posisi forum sebagai ruang dialog bersama, bukan sebagai lembaga proyek atau organisasi struktural.

Berangkat dari pengalaman tersebut, buku ini mencoba merekam dan merefleksikan peran Forum Jatinangor sebagai ruang dialog dan fasilitator komunikasi antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha. Forum Jatinangor tidak lahir dari mandat formal, melainkan dari kesadaran kolektif bahwa pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa keterlibatan dan suara masyarakat lokal. Dialog menjadi fondasi utama, bukan

hanya sebagai metode komunikasi, tetapi sebagai cara membangun kepercayaan dan kesepahaman bersama.

Pengalaman yang disajikan dalam buku ini menunjukkan bahwa banyak persoalan pembangunan kawasan sesungguhnya berakar pada terputusnya komunikasi dan ketidakseimbangan relasi antar-aktor. Perguruan tinggi dengan segala potensi keilmuannya sering kali belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat sekitar. Di sisi lain, masyarakat kerap tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan pengalamannya. Dalam konteks inilah Forum Jatinangor berupaya hadir sebagai pen jembatan.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai laporan keberhasilan atau model yang serba ideal. Sebaliknya, buku ini disusun sebagai refleksi atas proses, dinamika, tantangan, serta pembelajaran yang dialami dalam praktik kolaborasi di Jatinangor. Pembangunan kawasan berbasis dialog adalah proses yang panjang, penuh keterbatasan, namun tetap memungkinkan ketika dilandasi kesadaran kolektif dan komitmen bersama.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada **Jurusan Planologi Institut Teknologi Bandung**, khususnya kepada **Bapak Tubagus Furqon, Bapak Hastu Probo, Ibu Teti Argo, Bapak Wilmar**, serta seluruh tim Planologi ITB yang telah menjadi mitra dialog, pendamping, dan rekan belajar dalam perjalanan panjang ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Bapak Ery Supriyadi dan tim dari IKOPIN**, yang telah berkontribusi penting dalam penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan stakeholder—masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha—yang telah menjadi bagian dari proses bersama ini. Perjalanan tersebut tidak hanya memperkaya praktik pemberdayaan masyarakat, tetapi juga

memberikan warna dan makna tersendiri bagi kehidupan penulis secara pribadi.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, pembuat kebijakan, serta siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Semoga pengalaman Forum Jatinangor dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi wilayah lain dengan dinamika serupa.

Jatinangor, 2026

Dudi Supardi

ABSTRAK

Buku *Membangun Jatinangor dari Dialog* merefleksikan proses pembangunan kawasan pendidikan Jatinangor melalui pendekatan dialog multistakeholder yang melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha. Berangkat dari pengalaman empiris penulis yang lahir dan besar di Jatinangor serta terlibat langsung dalam Forum Jatinangor, buku ini menggambarkan bagaimana dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi di kawasan tersebut.

Melalui perpaduan kajian pustaka pembangunan wilayah, peran perguruan tinggi, dan praktik pemberdayaan masyarakat, buku ini menempatkan dialog sebagai instrumen penting dalam menjembatani kepentingan beragam aktor pembangunan. Forum Jatinangor disajikan sebagai contoh konkret ruang kolaborasi yang memungkinkan pertukaran gagasan, pengelolaan konflik, serta perumusan solusi bersama atas berbagai persoalan kawasan.

Buku ini ditujukan tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi praktisi pembangunan, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian pada pembangunan kawasan berbasis partisipasi dan kolaborasi. Dengan pendekatan reflektif dan kontekstual, buku ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran praktis serta memperkaya literatur tentang pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: pembangunan wilayah; dialog multistakeholder; perguruan tinggi; pemberdayaan masyarakat; ekonomi produktif; Forum Jatinangor; kawasan pendidikan

SINOPSIS BUKU

Jatinangor dikenal sebagai kawasan pendidikan tinggi dengan dinamika pembangunan yang kompleks. Kehadiran perguruan tinggi, pertumbuhan ekonomi, dan arus pendatang membawa peluang besar, namun sekaligus memunculkan berbagai persoalan sosial, ketimpangan, dan jarak komunikasi antara masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan.

Buku ini merekam dan merefleksikan pengalaman Forum Jatinangor sebagai ruang dialog dan fasilitator komunikasi multi stakeholder dalam pembangunan kawasan. Berangkat dari kesadaran kolektif masyarakat, Forum Jatinangor hadir bukan sebagai lembaga formal, melainkan sebagai simpul yang menjembatani relasi antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha. Dialog, kepercayaan, dan proses partisipatif menjadi pondasi utama dalam setiap praktik yang dijalankan.

Melalui uraian kontekstual, praktik kolaborasi, serta studi kasus konkret, buku ini menunjukkan bahwa banyak persoalan pembangunan sesungguhnya berakar pada terputusnya komunikasi dan ketidakseimbangan relasi antar-aktor. Pengalaman Forum Jatinangor memperlihatkan bahwa kontribusi perguruan tinggi akan lebih bermakna ketika difasilitasi oleh lembaga lokal yang memahami konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.

Buku ini tidak menawarkan solusi instan, melainkan pelajaran berharga tentang pembangunan kawasan berbasis dialog dan kesadaran kolektif. Ditujukan bagi akademisi, praktisi pemberdayaan masyarakat, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang peduli pada pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan, buku ini

diharapkan menjadi sumber inspirasi sekaligus pembelajaran bagi wilayah lain dengan dinamika serupa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
ABSTRAK.....	6
SINOPSIS BUKU.....	7
DAFTAR ISI.....	9
BAB I. PENDAHULUAN.....	12
1.1 Pembangunan sebagai Proses Sosial.....	12
1.2 Transformasi Wilayah Jatinangor sebagai Kawasan Strategis Pendidikan.....	12
1.3 Perkembangan Perguruan Tinggi dan Dinamika Ekonomi.....	13
1.4 Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal Jatinangor.....	14
1.5 Paradoks Pembangunan Kawasan Pendidikan.....	15
1.6 Permasalahan Pembangunan dan Tiga Degradasi di Jatinangor....	16
1.7 Fokus dan Batasan Kajian.....	17
1.8 Tujuan Penulisan.....	17
BAB II. JATINANGOR DAN DINAMIKA PEMBANGUNAN KAWASAN.....	19
2.1 Peran Lembaga Lokal dan Modal Sosial.....	19
2.2 Pengembangan Wilayah Berbasis Pendidikan Tinggi.....	19
2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Ketimpangan.....	20
2.4 Perguruan Tinggi sebagai Agen Pembangunan Wilayah.....	21
2.5 Tridarma Perguruan Tinggi dalam Perspektif Pembangunan.....	22
2.6 Tanggung Jawab Sosial Perguruan Tinggi (University Social Responsibility).....	23
2.7 Community–University Partnership sebagai Model Kolaborasi....	23
2.8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Inklusif.....	24
2.8.1 Ekonomi Produktif dalam Perspektif Pembangunan.....	28
2.8.2 Pengertian Usaha Ekonomi Produktif dan Usaha Kecil.....	29

2.8.3 Industri Kecil dan Karakteristik Teknis Usaha Ekonomi Produktif.....	30
2.8.4 Peran Negara dan Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil...	31
2.8.5 Kewirausahaan sebagai Jiwa Ekonomi Produktif.....	31
2.8.6 Ekonomi Produktif dalam Konteks Pemberdayaan Lokal Jatinangor.....	32
2.9 Kerangka Konseptual Pembangunan Kawasan Pendidikan yang Inklusif.....	33
BAB III. PERGURUAN TINGGI DAN MASYARAKAT LOKAL.....	35
3.1 Perguruan Tinggi dan Pembangunan Wilayah.....	35
3.2 Kontribusi Perguruan Tinggi: Dari Menara Gading ke Aset.....	37
3.3 Bidang-Bidang Kontribusi Perguruan Tinggi.....	37
3.3.1 Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Keterampilan.....	37
3.3.2 Pemanfaatan Penelitian dan Inovasi.....	38
3.3.3 Pemberdayaan Masyarakat sebagai Proses.....	38
3.3.4 Kemitraan dan Sinergi Lokal.....	39
3.3.5 Pemberdayaan Masyarakat sebagai Inti Pembangunan Ekonomi Lokal.....	39
3.3.6 Usaha Ekonomi Produktif sebagai Wahana Pemberdayaan..	40
3.3.7 Alur Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Ekonomi Produktif.....	41
3.3.8 Implikasi Kebijakan.....	41
3.3.9 Penutup.....	42
BAB IV. FORUM JATINANGOR SEBAGAI FASILITATOR KOMUNIKASI.....	43
4.1 Pengantar Reflektif.....	43
4.2 Lahirnya Forum Jatinangor: Dari Kegundahan Menuju Kesadaran Kolektif.....	43
4.3 Forum Jatinangor sebagai Fasilitator Komunikasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi.....	45
4.4 Praktik Kolaborasi Forum Jatinangor dan Perguruan Tinggi.....	47
4.5 Studi Kasus Unggulan: Penguatan Kelompok Tani Ikan Berbasis Dialog dan Kebutuhan Lokal.....	49

4.5.1 Situasi Awal: Potensi Lokal yang Tidak Terhubung.....	49
4.5.2 Peran Forum Jatinangor: Menjembatani Produksi dan Kebutuhan Pasar.....	50
4.5.3 Keterlibatan Perguruan Tinggi: Transfer Pengetahuan yang Kontekstual.....	51
4.5.4 Dampak dan Pembelajaran: Dari Pelatihan ke Kesadaran Kolektif.....	51
4.6 Refleksi, Tantangan, dan Masa Depan Forum Jatinangor.....	52
BAB V. PENUTUP DAN REKOMENDASI.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Pelajaran Kunci (Lessons Learned).....	54
5.3 Rekomendasi.....	55
5.3.1 Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah.....	55
5.3.2 Rekomendasi bagi Perguruan Tinggi.....	56
5.3.3 Rekomendasi bagi Masyarakat dan Lembaga Lokal.....	56
5.4 Penutup.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR SINGKATAN.....	60
PROFIL PENULIS.....	61

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Pembangunan sebagai Proses Sosial

Pembangunan tidak dapat dipahami semata sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik wilayah. Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses sosial yang melibatkan relasi antar-aktor dengan kepentingan, nilai, dan kekuasaan yang berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas interaksi, dialog, dan kepercayaan yang terbangun di antara para pemangku kepentingan (Healey, 2008).

Sejalan dengan pandangan tersebut, pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mendengarkan suara kelompok yang selama ini terpinggirkan serta mengakui pengetahuan lokal sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Chambers, 1997).

1.2 Transformasi Wilayah Jatinangor sebagai Kawasan Strategis Pendidikan

Jatinangor merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sumedang yang mengalami transformasi ruang dan fungsi wilayah paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan tersebut tidak berlangsung secara alamiah, melainkan melalui serangkaian kebijakan pemerintah yang secara langsung mengubah struktur tata ruang, peruntukan lahan, serta arah pembangunan wilayah.

Secara administratif, perubahan status Jatinangor diperkuat melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000** tentang pembentukan dan penataan kecamatan, serta **Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2001**, yang menetapkan Jatinangor sebagai kecamatan tersendiri. Penetapan ini menjadi landasan kelembagaan bagi pengembangan kawasan strategis di wilayah tersebut.

Namun perubahan paling mendasar terjadi lebih awal, yaitu ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi melalui **Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/SK.83.PLK/89 tanggal 25 Januari 1989**. Melalui kebijakan ini, wilayah Jatinangor yang sebelumnya didominasi kawasan perkebunan dialihfungsikan menjadi kawasan perguruan tinggi tertentu beserta kawasan penunjangnya. Pembagian kawasan tersebut meliputi kawasan IPDN seluas ± 280 hektare, Ikopin ± 28 hektare, Unwim ± 51 hektare, Unpad ± 175 hektare, Bumi Perkemahan Kiarapayung ± 66 hektare, kawasan greenbelt ± 140 hektare, serta cadangan konservasi ± 194 hektare.

Penetapan tersebut menjadikan Jatinangor sebagai salah satu kawasan pendidikan tinggi terbesar di Jawa Barat dan Indonesia, sekaligus menjadi titik awal perubahan struktur ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

1.3 Perkembangan Perguruan Tinggi dan Dinamika Ekonomi Kawasan

Keberadaan sejumlah perguruan tinggi berskala nasional di Jatinangor telah mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara pesat. Aktivitas akademik yang melibatkan puluhan ribu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan menciptakan permintaan besar terhadap berbagai sektor ekonomi penunjang, seperti perumahan dan

kos-kosan, kuliner, transportasi, perdagangan, jasa, serta sektor informal lainnya.

Dalam perspektif pembangunan wilayah, perguruan tinggi berperan sebagai **pusat pertumbuhan ekonomi (growth pole)** yang memicu efek pengganda (*multiplier effect*). Peredaran uang meningkat, investasi properti tumbuh, dan infrastruktur berkembang mengikuti kebutuhan kawasan pendidikan. Secara makro, kondisi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi regional dan pendapatan daerah.

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung bersifat eksklusif dan tidak terintegrasi secara optimal dengan kapasitas masyarakat lokal. Aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan perguruan tinggi lebih banyak digerakkan oleh pendatang yang memiliki modal, pendidikan, dan jejaring usaha yang lebih kuat. Sementara itu, masyarakat asli Jatinangor sering kali hanya menjadi penonton atau terlibat dalam sektor informal dengan tingkat pendapatan rendah dan tidak berkelanjutan.

1.4 Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal Jatinangor

Ketimpangan antara pertumbuhan kawasan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat lokal semakin nyata ketika ditinjau dari data sosial-ekonomi. Berdasarkan **sensus tenaga kerja yang dilakukan oleh Forum Jatinangor di Kecamatan Jatinangor**, tercatat bahwa **lebih dari 21% penduduk berada dalam kondisi pengangguran atau bekerja dengan pola dan penghasilan yang tidak jelas**. Angka ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi yang berkembang belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara efektif.

Dari sisi pendidikan, struktur sumber daya manusia masyarakat Jatinangor masih relatif rendah. Data Forum Jatinangor menunjukkan bahwa **hampir 50% tenaga kerja hanya berpendidikan lulusan Sekolah Dasar**, sementara **lulusan perguruan tinggi hanya mencapai sekitar 4,1%**. Rendahnya tingkat pendidikan ini menjadi faktor penghambat utama bagi masyarakat lokal untuk mengakses peluang kerja dan usaha yang muncul di kawasan perguruan tinggi dan industri.

Kondisi tersebut diperparah oleh dominasi pendatang dalam penguasaan aktivitas ekonomi penunjang perguruan tinggi. Sekitar **68,5% kegiatan ekonomi di kawasan Jatinangor dikuasai oleh pendatang**, sedangkan **penduduk lokal hanya menguasai sekitar 31,5%**. Fakta ini menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari keberadaan perguruan tinggi belum mengalir secara proporsional kepada masyarakat asli Jatinangor.

1.5 Paradoks Pembangunan Kawasan Pendidikan

Realitas di Jatinangor menunjukkan adanya paradoks pembangunan yang mencolok. Di satu sisi, Jatinangor dikenal secara nasional sebagai kawasan pendidikan tinggi dengan reputasi akademik yang kuat. Perguruan tinggi di wilayah ini menjadi magnet bagi mahasiswa dari berbagai daerah, serta menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan dan modernitas.

Namun di sisi lain, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kampus justru menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi, lapangan kerja, dan peluang ekonomi yang layak. Banyak anak muda usia produktif tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang berada di wilayahnya sendiri, sementara peluang kerja yang tersedia menuntut keterampilan dan kompetensi yang tidak mereka miliki.

Kondisi ini menempatkan perguruan tinggi dalam posisi yang kerap dipersepsikan sebagai “**menara gading**”: unggul secara akademik dan ekonomi, tetapi terpisah dari realitas sosial masyarakat di sekitarnya. Paradoks ini mengindikasikan adanya kegagalan integrasi antara kebijakan pengembangan kawasan pendidikan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal.

1.6 Permasalahan Pembangunan dan Tiga Degradasi di Jatinangor

Dampak dari pembangunan yang tidak inklusif di Jatinangor tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, moral, dan lingkungan. Masyarakat Jatinangor mengidentifikasi terjadinya **tiga bentuk degradasi** sebagai konsekuensi dari perubahan wilayah yang berlangsung cepat.

Pertama, **degradasi moral**. Jatinangor yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan permukiman agraris yang relatif tenang kini menghadapi meningkatnya kasus pencurian, perkelahian, tindakan asusila, pembuangan bayi, konsumsi minuman keras, serta peredaran narkoba. Masuknya pendatang dalam jumlah besar tanpa diimbangi penguatan kontrol sosial telah melemahkan nilai dan norma lokal.

Kedua, **degradasi lingkungan**. Alih fungsi lahan yang masif menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Saat musim hujan, wilayah Jatinangor kerap mengalami banjir, sementara pada musim kemarau terjadi kekurangan air. Kemacetan lalu lintas, parkir tidak teratur, serta meningkatnya angka kecelakaan menjadi persoalan sehari-hari yang mengganggu kualitas hidup masyarakat.

Ketiga, **degradasi sosial**. Meskipun di bagian utara berdiri kawasan perguruan tinggi dan di bagian selatan berkembang kawasan industri,

tingkat pengangguran masyarakat lokal tetap tinggi. Rendahnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan banyak penduduk usia kerja tidak terserap dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketimpangan.

1.7 Fokus dan Batasan Kajian

Berdasarkan kondisi tersebut, buku ini difokuskan pada analisis **kontribusi keberadaan perguruan tinggi terhadap pengembangan ekonomi produktif masyarakat lokal di Jatinangor**. Kajian ini tidak hanya menyoroti dampak ekonomi secara makro, tetapi juga menelaah sejauh mana perguruan tinggi mampu berperan dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta mendorong usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Pembahasan dibatasi pada hubungan antara perguruan tinggi, dinamika ekonomi kawasan, kondisi sosial masyarakat lokal, serta peran strategis perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kemitraan pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan kawasan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1.8 Tujuan Penulisan

Buku ini ditulis dengan tujuan:

1. **Merekam dan merefleksikan pengalaman Forum Jatinangor** sebagai praktik nyata dialog multi stakeholder dalam pembangunan kawasan pendidikan Jatinangor.
2. **Menegaskan peran strategis perguruan tinggi** dalam pembangunan wilayah melalui kemitraan yang setara dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah.
3. **Membagikan pembelajaran praktis** yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang ingin membangun forum serupa dalam mengelola perubahan kawasan.
4. **Memberikan kontribusi pemikiran** bagi pengembangan literatur pembangunan wilayah yang menekankan partisipasi, kolaborasi, dan dialog sebagai basis pembangunan berkelanjutan.

PROFIL PENULIS



Dudi Supardi lahir di Bandung dan akrab disapa **Kang Dudi**. Sejak usia muda, ia aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan kebudayaan. Latar belakang pendidikannya sebagai Sarjana Teknik Sipil membawanya bekerja sebagai konsultan perencana di **PT Wiranta Bhuana Raya** sejak tahun 1990.

Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam perjalanan hidupnya. Setelah kembali ke kampung halaman, ia mulai memusatkan perhatian pada kegiatan **pemberdayaan masyarakat**, khususnya di wilayah Sumedang dan sekitarnya. Keterlibatan yang konsisten dalam aktivitas sosial dan pembangunan lokal kemudian mendorong tokoh masyarakat untuk mengajaknya terlibat dalam proses politik di tingkat daerah.

Pada tahun 2007, Dudi Supardi terpilih sebagai **anggota DPRD Kabupaten Sumedang**. Selama menjalankan peran tersebut, ia tetap menjaga keterhubungan dengan komunitas akademik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dorongan untuk memperdalam pemahaman akademik terhadap praktik pembangunan membawanya melanjutkan studi Magister (S2) dengan konsentrasi **Pembangunan Ekonomi Wilayah** pada tahun 2009.

Ia kembali dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang pada tahun 2014 dan menjalani dua periode masa jabatan hingga tahun 2024. Pengalaman sebagai wakil rakyat menumbuhkan ketertarikan yang lebih mendalam terhadap isu tata kelola dan kinerja lembaga legislatif, yang kemudian menjadi fokus studi doktoralnya (S3) melalui disertasi mengenai **kinerja anggota dewan**.

Saat ini, Dudi Supardi beraktivitas sebagai **dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas April Sumedang**. Ia juga dipercaya sebagai **Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sumedang**. Melalui peran tersebut, ia terlibat dalam berbagai inisiatif peningkatan kesejahteraan petani, antara lain melalui kerja sama dengan **Balitbang Ketahanan Pangan Mandiri dan KST Cilembu**. Beberapa kegiatan yang dikembangkan mencakup budidaya Ubi Cilembu di luar wilayah Indikasi Geografis (IG) dengan kualitas rasa yang setara, serta penerapan metode tanam padi **KSP** yang mampu meningkatkan produktivitas hingga **12–16 ton per hektar**.